

**BERITA ACARA
HASIL REVIU RENSTRA DAN IKU
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2018**

Nomor : 050 / BA . 3520 / TU

Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (20-8-2019), kami Tim Reviu Sekretariat Daerah Kota Cimahi, yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Daerah Kota Cimahi Nomor: 050/854/TU, Tanggal 27 Februari 2019, telah melaksanakan Reviu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris Daerah, dengan rincian hasil sebagai berikut :

I. TUJUAN

a. Uraian Tujuan Sebelum Reviu

MISI KOTA	TUJUAN
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
3. Memberdayakan Perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sector jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan	2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan	3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Tujuan

1. Tetap
2. Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi merupakan tujuan Tingkat Kota, saran Kemenpan untuk tidak menjadi tujuan Setda
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengarusutamaan Gender merupakan tujuan Tingkat Kota, saran Kemenpan untuk tidak menjadi tujuan Setda

c. Uraian Tujuan Sebelum dan Setelah Reviu

TUJUAN	
Sebelum Reviu	Setelah Reviu
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	-
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengarusutamaan Gender	-

II. INDIKATOR TUJUAN

a. Uraian Indikator Tujuan Sebelum Reviu

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengarusutamaan Gender	

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Indikator Kinerja

Setda mempunyai indikator tujuan sebagai tolak ukur atas pencapaian kinerja organisasi
--

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Tujuan

1. Tetap
2. Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi merupakan tujuan Tingkat Kota, saran Kemenpan untuk tidak menjadi tujuan Setda
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengarusutamaan Gender merupakan tujuan Tingkat Kota, saran Kemenpan untuk tidak menjadi tujuan Setda

c. Uraian Tujuan Sebelum dan Setelah Reviu

TUJUAN	
Sebelum Reviu	Setelah Reviu
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	-
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengarusutamaan Gender	-

II. INDIKATOR TUJUAN

a. Uraian Indikator Tujuan Sebelum Reviu

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengarusutamaan Gender	

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Indikator Kinerja

Setda mempunyai indikator tujuan sebagai tolak ukur atas pencapaian kinerja organisasi
--

c. Uraian Indikator Tujuan Sebelum dan Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA	
Sebelum Reviu	Setelah Reviu
-	1. Indeks Reformasi Birokrasi

III. SASARAN

a. Uraian Sasaran Sebelum Reviu

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah
	2. Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah
	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	5. Menurunnya Kemiskinan
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengarusutamaan Gender	6. Meningkatnya partisipasi masyarakat Dalam Pembangunan

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Sasaran

1. Setda lebih menitik beratkan pada Akuntabilitas Kinerja Daerah
2. Sasaran optimalnya tata kelola keuangan dan Barang Milik Daerah tidak sesuai dengan tupoksi Setda. Saran untuk dialihkan ke BPKAD
3. Tetap
4. Tetap
5. Sasaran ini lebih mengena untuk diampu oleh OPD Teknis
6. Sasaran ini lebih mengena untuk diampu oleh OPD Teknis

c. Uraian Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu

SASARAN	
Sebelum Reviu	Setelah Reviu
1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	-
2. Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	-
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di lingkup Sekretariat Daerah
5. Menurunnya Kemiskinan	-
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat Dalam Pembangunan	-

IV. INDIKATOR KINERJA SASARAN

d. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum Reviu

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	1. Nilai LPPD
2. Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	2. Opini BPK
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3. Survey Kepuasan Masyarakat
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	4. SAKIP
5. Menurunnya Kemiskinan	5. Angka Kemiskinan
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat Dalam Pembangunan	6. Meningkatnya partisipasi masyarakat Dalam Pembangunan

e. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Indikator Kinerja

1. Tetap
2. Untuk dihilangkan dari Indikator Kinerja Setda karena tidak sesuai dengan Tupoksi Setda, untuk dialihkan ke BPKAD
3. Saran Kemenpan, meskipun Setda sebagai koordinator dan fasilitator namun tetap dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dapat melihat dan mengukur tingkat pelayanan publik
4. Indikator kinerja Setda bukan terhadap sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sakip), tetapi terhadap nilai AKIP Kota
5. Indikator angka kemiskinan merupakan Indikator Kinerja dari OPD Teknis yang menangani Bidang Kemiskinan
6. Indikator partisipasi masyarakat lebih ditekankan kepada Indikator Kinerja dari OPD yang menangani Pemberdayaan Masyarakat

f. Uraian Indikator Kinerja Sasaran Sebelum dan Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA	
Sebelum Reviu	Setelah Reviu
1. Nilai LPPD	2. Nilai LPPD
2. Opini BPK	-
3. Survey Kepuasan Masyarakat	3. Nilai Rata-rata IKM Kota
4. SAKIP	4. Nilai AKIP Kota
5. Angka Kemiskinan	-
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat Dalam Pembangunan	-
	5. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

V. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian IKU Sebelum Reviu

SASARAN	IKU
1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah	-
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	-
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	-
5. Menurunnya kemiskinan	-
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat	2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang IKU

1. Sesuai dengan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yang menjadi indikator kinerja utama Sekretariat Daerah dipisahkan menjadi Nilai AKIP Kota, Nilai LPPD dan Nilai Indeks Refomasi Birokrasi
2. Sekretariat Daerah tidak menghitung tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan namun tetap memberikan pelayanan administrasi yang diukur melalui IKM

c. Uraian IKU Sebelum dan Setelah Reviu

IKU	
Sebelum Reviu	Setelah Reviu
1. Indeks Reformasi Birokrasi	1. Nilai AKIP Kota
	2. Nilai LPPD
	3. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	4. Nilai Rata-rata IKM Kota

VI. FORMULASI INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKS) dan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian Formulasi IKS/IKU Sebelum Reviu

Indikator Kinerja Sasaran	Alasan (sebelum reviu)	Cara Pengukuran (sebelum reviu)	Keterangan / Kriteria (sebelum reviu)
1. Nilai LPPD	Berdasarkan Perwal Nomor 35 Tahun 2016 Bahwa Salah Satu Tugas Pokok Bagian Pemerintahan Adalah Menyusun Laporan Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai Hasil LPPD Kemendagri	1. Berdasarkan target RPJMD 2017-2022 2. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawa ban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 3. Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah

2. Opini BPK	Berdasarkan Perwal Nomor 35 Tahun 2016, dimana adanya kewenangan perumusan Standar Satuan Belanja (SSB) yang menjadi tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan yang merupakan salah satu upaya untuk mendorong tercapainya opini BPK	Hasil evaluasi terhadap laporan Keuangan Daerah	1. Kesesuaian dengan standar akuntansi 2. Kecukupan pengungkapan 3. Kepatuhan terhadap perundang-undangan 4. Efektifitas sistem pengendalian intern
3. Survey Kepuasan Masyarakat	Berdasarkan Perwal Nomor 35 Tahun 2016, dimana adanya kewenangan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan pelayanan publik melalui kegiatan rekapitulasi hasil survey kepuasan masyarakat pada Bagian Organisasi	Total Nilai Persepsi per unsur terhadap Total Unsur yang terisi dikali nilai penimbang	1. Berdasarkan Target Sasaran RPJMD 2017-2022 2. Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik

4. SAKIP	Berdasarkan Perwal Nomor 35 Tahun 2016, dimana penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP) Kota menjadi tugas dan fungsi Bagian Organisasi	Nilai hasil evaluasi AKIP oleh Kemenpan RB	1. Berdasarkan target sasaran RPJMD 2017-2022 2. Permenpan-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Angka Kemiskinan	Berdasarkan Perwal Nomor 35 Tahun 2016, pada Bagian Administrasi Perekonomian terdapat kewenangan dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Cimahi.	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS Sasaran) yang menerima Raskin terhadap jumlah target RTS yang menerima Raskin dikali 100%	1. Berdasarkan target sasaran RPJMD 2017-2022
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat Dalam Pembangunan	Mengacu pada Visi ke 5 RPJMD Kota Cimahi dan Kewenangan Pemberdayaan Masyarakat di Bagian Pemerintahan	Tingkat Partisipasi sama dengan jumlah pemilih yang hadir di TPS dibagi jumlah DPT dikali 100%	1. Berdasarkan target sasaran RPJMD 2017-2022 2. Data Pemilih Tetap Kota Cimahi

	sesuai Perwal 35 Tahun 2016 serta Fasilitas Kegiatan Pemilihan Umum, yang akan mengukur tingkat partisipasi dalam pemilu. Maka IKU ini dicantumkan menjadi IKU Setda		
--	--	--	--

b. Rekomendasi Tim Reviu /Narasumber tentang Formulasi IKS

1. - Nilai hasil LPPD berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat - Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah
2. Penilaian atas laporan keuangan daerah merupakan sasaran tingkat kota
3. Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik
4. Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah
5. Nilai hasil evaluasi AKIP dihitung berdasarkan Permenpan-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Berdasarkan Perwal Nomor 35 Tahun 2016, pada Bagian Administrasi Perekonomian terdapat kewenangan dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Cimahi, namun setelah dilakukan penelaahan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan sangat kecil untuk mampu dapat mengentaskan kemiskinan karena hanya money raskin

c. Uraian IKS/IKU Setelah Reviu

Indikator Kinerja Sasaran	Alasan (setelah reviu)	Cara Pengukuran (setelah reviu)	Keterangan / Kriteria (setelah reviu)
1. Nilai AKIP Kota	Merupakan penilaian akuntabilitas kinerja Setda untuk mendukung Kota Cimahi mendapatkan nilai SAKIP 'BB'	Nilai Hasil evaluasi AKIP oleh Kemenpan-RB	1. Berdasarkan target sasaran RPJMD 2017-2022 2. Permenpan-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Nilai LPPD		Nilai Hasil LPPD Kemendagri	1. Berdasarkan target RPJMD 2017-2022 2. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 3. Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang tata cara

			pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah
4. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Sesuai saran Kemenpan-RB bahwa setiap unit pelayanan publik wajib untuk melaksanakan 8 area perubahan	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB oleh Kemenpan-RB	1. Berdasarkan Target Sasaran RPJMD 2017-2022 2. Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah
5. Nilai Rata-rata IKM Kota		Total Nilai Persepsi per unsur terhadap Total Unsur yang terisi dikali nilai penimbang	1. Berdasarkan Target Sasaran RPJMD 2017-2022 2. Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik

VII. TARGET KINERJA

a. Rincian Target Indikator Kinerja (IKS/IKU) Sebelum Reviu

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2017)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Nilai LPPD	Indeks	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
2. Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

3. Survey Kepuasan Masyarakat	SKM	78	78	80	82	84	86	86
4. SAKIP	Indeks	B	B	BB	BB	A	A	A
5. Angka Kemiskinan	%	N/A	8,3%	7,5%	6,8%	6,6%	5,3%	5,3%
6. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%

b. Rekomendasi Tim Reviu / Narasumber tentang Target Kinerja Sasaran

Target kinerja sasaran harus menggambarkan hasil akhir yang dapat diukur pada setiap tahun anggaran berdasarkan rumusan cara pengukuran yang telah ditetapkan dengan memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik.

c. Rincian Target Indikator Kinerja (IKS/IKU) Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2017)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Nilai AKIP Kota	Indeks	B	B	BB	BB	A	A	A
2. Nilai LPPD	Nilai	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
3. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Indeks	C	Cc	Cc	Cc	Cc	B	B
4. Nilai Rata-rata IKM Kota	Indeks	B	B	B	B	B	B	B

Berdasarkan hasil reviu tersebut di atas maka **Tabel Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 Sebelum dan Setelah Reviu Tahun 2018**, adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN SEBELUM REVIU	SASARAN SETELAH REVIU	INDIKATOR KINERJA SEBELUM REVIU	INDIKATOR KINERJA SETELAH REVIU
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokasi	1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah 2. Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	- - 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah	Nilai LPPD Opini BPK Survey Kepuasan Masyarakat	- - Nilai Rata-rata IKM Kota Nilai AKIP Kota
2.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi		5. Menurunnya Kemiskinan	- -	Angka Kemiskinan	Nilai LPPD Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi -
3.	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengarusutamaan Gender		6. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	-	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	

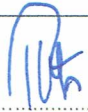
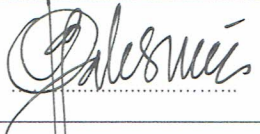
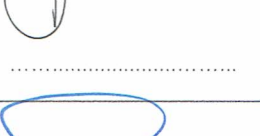
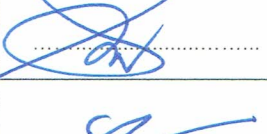
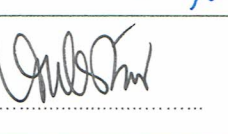
Berdasarkan hasil revidi tersebut di atas maka Tabel Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2017-2022 Sebelum Hasil Revidi Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2017)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2022)
							2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	-	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Indeks	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
			Optimalnya Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	SKM	78	78	80	82	84	86	86
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	SAKIP	Indeks	B	B	BB	BB	A	A	A
2.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	-	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	N/A	8,3%	7,5%	6,8%	6,6%	5,3%	5,3%
3.	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengarusutamaan Gender	-	Meningkatnya partisipasi masyarakat Dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%

Berdasarkan hasil revidi tersebut di atas maka **Tabel Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2017-2022** Sesudah Hasil Revidi Tahun 2018, adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2017)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2022)
							2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Kota	Indeks	B	B	BB	BB	A	A	A
				Nilai LPPD	Nilai	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
				Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Indeks	C	Cc	Cc	Cc	Cc	B	B
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Rata-rata IKM Kota	Indeks	B	B	B	B	B	B	B

TIM REVIU RENSTRA DAN IKU SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI

KETUA TIM			
	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	H. TATA WIKANTA, S.H., M.Si.	
ANGGOTA			
1.	Plt. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	RADEN TINI MARTINI, S.H., M.M.	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	RADEN TINI MARTINI, S.H., M.M.	
3.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESRA	MARDI SANTOSO, S.Sos.	
4.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	Dra. TRI LAKSMIHINDIAH, M.M.	
5.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	TITA MARIAM, S.Pt., M.M.	
6.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/ JASA	AINUL YAKIN, S.E., M.Si.	
7.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	SITI FATONAH, S.Sos., M.Si.	
8.	Plt. KEPALA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	Dra. NINING RATNANINGSIH, M.M.	
9.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	Dra. NINING RATNANINGSIH, M.M.	
10.	KEPALA SUBBAG PROGRAM DAN PELAPORAN SETDA	CONI NICKELLIA	

Cimahi, Agustus 2019

Mengetahui :
Sekretaris Daerah Kota Cimahi,



DIKDIK.S. NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.

Pembina Tk.I

NIP. 19720520 199901 1 001